



Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)

Irawansyah¹, Aldi Apriansyah², Dedi Supriadi³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: irawansyah@uts.ac.id, aldi.apriansyah@uts.ac.id, dedi.supriadi@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-03	<p>This study aims to find out how the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning the Regional Community Empowerment Program (PDPGR) in implementing the Uninhabitable Houses Program in Telaga Bertong Village, Taliwang District. The method used in this research is descriptive qualitative. The data sources used are primary data and secondary data obtained from data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it was shown that the existence of Regional Regulation Number 2016 concerning the Mutual Cooperation Empowerment Area Program (PDPGR) in the implementation of the Uninhabitable Houses Program (RTLH) in Telaga Bertong Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency had an impact on increasing welfare, although not yet in large scale and has reduced the number of uninhabitable houses (RTLH) annually. From the research results, 47 housing units have been realized from 2018 to 2020 in the Telaga Bertong Village and there is communication between the organization and the activities of the executors.</p>
Keywords: <i>Implementation;</i> <i>Policy;</i> <i>Regional Regulation No. 3 of 2016.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-03	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPGR) dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, meskipun belum dalam skala besar serta telah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) pertahunnya. Dari hasil penelitian sebanyak 47 unit rumah telah di realisasikan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Kelurahan Telaga Bertong serta adanya komunikasi antara organisasi dan kegiatan para pelaksana.</p>
Kata kunci: <i>Implementasi;</i> <i>Kebijakan;</i> <i>Perda No 3 Tahun 2016.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Pemberdayaan Gotong Royong sebagai program utama daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PDPGR pasal 1 ayat 6 Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan sungguh-sungguh (IJS) dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan kepada masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan kemiskinan. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Program PDPGR di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari beberapa jenis kegiatan seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana lingkungan

(jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, prasarana, persampahan, jamban dan bedah rumah tidak layak huni). Kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni se-Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan data yang dihimpun agen pemberdayaan gotong royong sebanyak 6.187 rumah berhak menerima bantuan rehab rumah di Kabupaten Sumbawa Barat. Sebanyak 4.017 unit rumah tercatat sudah tersentuh program penuntasan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan dalam 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati HW Musyafirin-Fud Syaifuddin.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, dari 7 Kelurahan dan 57 desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari 15 desa/kelurahan yang ada di kecamatan Taliwang, salah satunya adalah

Kelurahan Telaga Bertong, yang merupakan kelurahan yang berada di kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 28 RT dan 6 Kepala Lingkungan. Program PDPGR dengan salah satu kegiatannya yaitu program RTLH tercatat sebanyak 47 unit rumah tidak layak huni telah direhabilitasi sejak tahun 2018/2020. Pada tahun 2018 sebanyak 25 unit rumah, tahun 2019 sebanyak 7 unit rumah, dan 2020 sebanyak 15 unit rumah dengan kategori rehab dan bangun baru. Ketertarikan peneliti menentukan tempat penelitian yaitu dengan lokasi di Kelurahan Telaga Bertong karena Kelurahan Telaga Bertong merupakan kelurahan dengan jumlah perumahan dan permukiman jauh dari kriteria layak huni terbanyak yaitu 192 RTLH yang tercatat di kelurahan Telaga Bertong kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah akses terhadap rumah layak huni terbatas, rendahnya mutu lingkungan permukiman serta lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Demikian juga persoalan perumahan dan permukiman di Kelurahan Telaga Bertong tidak terlepas dari kebijakan pemerintah didalam mengelola perumahan dan permukiman. Sejak tahun dikeluarkannya Undang- Undang No 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dengan salah satu kegiatannya yaitu Program Rumah Tidak Layak Huni yang dirasa selama perjalanannya, acuan tersebut dirasakan kurang sesuai lagi dengan berbagai perkembangan masalah yang semakin kompleks, sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berlokasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) dan Kelurahan Telaga Bertong Kabupaten Sumbawa Barat. Dimana focus penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program PDPGR dalam pelaksanaan Program RLH di Kelurahan Telaga Bertong? Dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program PDPGR dalam pelaksanaan Program RLH di Kelurahan Telaga Bertong?

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dimana orang yang akan diwawancarai adalah antara lain: kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Kelurahan Telaga Bertong, agen DPDGR dan beberapa masyarakat terakrit. Kemudian ada observasi dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal baik terjun langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun ke Kelurahan Telaga Bertong dan dokumentasi yaitu data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini. Sumber data berasal dari data primer yang mana data ini didapat secara langsung dengan mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan penelitian ini dan data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung, baik berupa dokumen, arsip, buku-buku, artikel dan beberapa sumber dari internet sebagai pendukung penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Telaga Bertong

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program PDPGR dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Telaga Bertong, peneliti dapat menjelaskan beberapa point penting dalam penelitian ini. Kebijakan tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan berbagai jenis kegiatan dari Program PDPGR tersebut salah satunya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut yaitu: Komunikasi Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu faktor mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam implementasi kebijakan program PDPGR dalam pelaksanaan program RTLH di kelurahan Telaga Bertong adalah komunikasi. Namun sebelum itu, perlu diketahui bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Sumber Daya, variabel selanjutnya yang berpengaruh dalam implmentasi kebijakan

program PDPGR dengan salah satu kegiatannya program RTLH di Kelurahan Telaga Bertong sehingga penulis mengkategorikan sebagai variabel yang kurang efektif adalah faktor sumberdaya. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III juga menambahkan "tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan pelaksanaannya dan tidak peduli mereka ditransmisikan dengan akurat, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kebijakan mengalami kekurangan dalam melakukan tugasnya, maka sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif". Sumber Daya Anggaran, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya intensif yang telah diberikan kepada implementator merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program yang tidak berjalan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaksana kebijakan rendah.

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk oprasionalisasi implementasi suatu kebijakan, agar memudahkan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Adanya fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Melihat hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dari faktor sumberdaya, pelaksanaan dari pada kebijakan program PDPGR dengan salah satu kegiatannya program RTLH di Kelurahan Telaga Bertong memang masih jauh dari keefektifan dan tuntutan dari pada maksud dan tujuan dari peraturan yang menyangkut tentang kebijakan program PDPGR dengan salah satu kegiatannya program RTLH di Kelurahan Telaga Bertong. Sumber daya kewenangan merupakan sumber daya lain yang cukup penting dalam menselanjutnya mentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksana-

kan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat putusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Sikap atau Disposisi Selain variabel komunikasi dan sumberdaya, salah satu variabel yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Dimana Menurut Edward III dalam Subarsono mengemukakan bahwa "kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Artinya Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa para implementor baik tingkat instansi tertinggi sampai dengan terendah di desa yaitu tim peliuk yang ditugaskan langsung untuk turun ke lapangan untuk menyampaikan tujuan dari program daerah. Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat variabel yang mempengaruhi jalannya implementasi atau penerapan suatu kebijakan. Aspek struktur birokrasi meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama yaitu mekanisme psds kebijakan biasanya dibuat standart operation prosedur (SOP) menjadi pedoman agar kebijakan yang dibuat tidak melenceng dari implementasi tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung yang dilakukan penulis, menyatakan bahwa secara mendasar variabel yang mendukung jalannya penerapan kebijakan program PDPGR dengan salah satu kegiatannya program RTLH di Kelurahan Telaga Bertong adalah struktur birokrasi. Menurut Bapak Arie Wahyudi, SE selaku

Ketua Kelurahan Telaga Bertong telah dilakukan wawancara langsung sebagai berikut: dalam menjalankan atau menerapkan kebijakan program PDPGR dengan salah satu kegiatannya program RTLH maka Kantor Kelurahan Telaga Bertong yang menjadi leading sector dari pelaksanaan program PDPGR atau dengan kata lain, Kantor Kelurahan Telaga Bertong disini yang bertindak sebagai badan pelaksana yang ada di wilayah Telaga Bertong. "(11 April 2022). Dari pernyataan tersebut peneliti menganalisa bahwa badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dalam Pelaksanaan Program RTLH di Kelurahan Telaga Bertong

Kesejahteraan, salah satu indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengamati pelaksanaan program, kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Telaga Bertong sudah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat walaupun dalam skala besar. Dapat dilihat dari terselenggaranya kegiatan PDPGR dengan salah satu kegiatan yaitu Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tercatat sebanyak 45 unit rumah yang telah direhab. Hal tersebut dapat dibuktikan dari salah satu hasil wawancara peneliti dengan Hamka selaku Ketua Tim Peliuk di Kelurahan Telaga Bertong, yaitu: "Dengan adanya Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini diharapkan membantu dalam mensejahterakan masyarakat dari tahun ke tahun agar jumlah masyarakat yang sejahtera kehidupannya semakin meningkat." (Telaga Bertong, 22 April 2022). Berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan PDPGR bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kelurahan Telaga Bertong sebagai salah satu Kelurahan yang menerima pengaruh besar terhadap

perubahan tatanan kehidupan baik dari segi ekonomi, sosial maupun kesehatan yang menjadi output pelaksanaan PDPGR sejak tahun 2016 sampai tahun 2020.

Akses, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akses dalam fungsi agen PDPGR tim yang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di desa/kelurahan telah memberikan pengaruh yang besar dalam keberlangsungan program di Kelurahan Telaga Bertong pada tahun 2020, hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya beberapa stakeholder khususnya kehadiran agen pemberdayaan PDPGR sebagai perpanjangan tangan program. Kontrol, peneliti menganalisa bahwa tim Pengendali dan Pengawas PDPGR merupakan tim yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan pada setiap pelaksanaan PDPGR. Hal ini dilakukan agar PDPGR tetap sinkron dengan perencanaan dan sesuai dengan isi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan PDPGR. Pengendalian Oleh Pemerintah Pengendalian oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu bentuk pengontrolan terhadap tugas dan fungsi PDPGR agar terlaksana dengan, efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.

Berkaitan dengan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah maka Iyan Aryasmara, S.IP selaku Kepala Seksi Bidang Pengembangan Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD Kabupaten Sumbawa Barat menjelaskan bahwa: "Pengendalian yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program, selain mengerahkan tim Pengendalian dan Pengawasan PDPGR, kami juga tetap melakukan proses verifikasi data dengan melibatkan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan jenis kegiatan PDPGR dan dibantu dengan tim Pengendalian dan Pengawasan." (Taliwang, 20 April 2022). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan PDPGR, pemerintah daerah mengarahkan tim pengendalian dan pengawasan serta melakukan proses verifikasi data yang dimana melibatkan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan jenis kegiatan PDPGR tersebut. Selain pengawasan oleh Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR, masyarakat berhak me-

lakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royong oleh Agen Pemberdayaan PDPGR. Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk Pemberian usul saran atau masukan dalam menyusun perencanaan gotong royong, Pemberian saran atau masukan secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royong, Pemberian informasi, masukan atau koreksi secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis kepada Bupati tentang pelaksanaan gotong royong.

Partisipasi atau peran pemerintah maupun masyarakat dalam kegiatan-kegiatan PDPGR sangat di perlukan untuk keberhasilan program. Partisipasi merupakan proses ikut serta individu masyarakat dalam kegiatan kelompok serta ikut memberikan masukan atau sumbangsi dalam bentuk apapun terhadap kegiatan yang dilakukan agar dapat menghargai pembangunan yang sedang dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Partisipasi atau peran masyarakat dalam pembangunan pedesaan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses membantu berjalannya tugas, fungsi PDPGR merupakan langkah supaya kebijakan ini bercorak partisipatif dan target yang sudah ditentukan dapat tercapai, sehingga perencanaan yang dibuat tidak hanya sebatas angan namun diperlukan hasil yang nyata dengan adanya keikutsertaan masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan gotong royong.

Masyarakat sebagai sasaran dalam pelaksanaan program, pemerintah daerah membuat dan menjalankan suatu kebijakan tentu yang merasakan manfaat serta dampaknya adalah masyarakat. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan penilaian terhadap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apakah kebijakan itu memberikan dampak yang baik atau bahkan membuat masyarakat merasa terbebani

dengan kebijakan pemerintah. Kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan Telaga Bertong menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan Program PDPGR. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hamka selaku Tim Peliuk di Kelurahan Telaga Bertong saat melakukan wawancara secara langsung : “pada Kegiatan program PDPGR ini keikutsertaan masyarakat terhadap pelaksanaan program daerah tentu sangat membutuhkan peran dari masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat Kelurahan Telaga Bertong terkadang tutup mata akan hal tersebut, sehingga pelaksanaan dari kegiatan yang berbasis gotong royong tidak dapat dilaksanakan secara maksimal” (Telaga Bertong, 20 April 2022). Pernyataan tersebut dipertegas kembali dengan pernyataan dari Iyan Aryasmita, S.IP selaku Kepala Seksi Bidang Pengembangan Partisipasi dan Kehidupan Sosial Masyarakat di DPMD, menjelaskan bahwa: “PDPGR merupakan program yang dimana harus ada peran aktif dari berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai keberhasilan program ini dengan penguatan gotong royong. Kegiatan PDPGR ini dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.” (Taliwang, 11 April 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan bahwa pada pelaksanaan kegiatan program PDPGR di Kelurahan Telaga Bertong belum optimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program PDPGR tersebut. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat tidak hanya Tim Pengendalian dan Pengawasan yang mempunyai tugas memantau pelaksanaan program, tetapi masyarakat Sumbawa Barat juga diberikan hak untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya program.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan PERDA No.3 Tahun 2016 tentang PDPGR terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kelurahan Telaga Bertong sudah berjalan sesuai dengan tujuan program yaitu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta dapat mengurangi angka kemiskinan meskipun belum mampu meringankan kemiskinan dalam skala besar. Namun melalui kegiatan Pembangunan Jamban, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bariri Tani, Bariri UMKM, Pariri Lansia dan Pariri Disabilitas diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut yang menjadi permasalahan dalam masyarakat secara bertahap.

2. Indikator keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 tentang PDPGR di Kelurahan Telaga Bertong yaitu indikator komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi dan struktur birokrasi. Namun dalam pelaksanaan kegiatan Program PDPGR tidak berjalan optimal dikarenakan rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana serta tidak adanya *Structure Operational Procedur (SOP)*.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan PDPGR yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya taraf kehidupan masyarakat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah berhasil merenovasi rumah tidak layak huni, pembuatan 1000 jamban di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Kelurahan Telaga Bertong, ditambah lagi dengan peningkatan jumlah kegiatan program PDPGR yang telah dirasakan oleh masyarakat setiap tahunnya. Akses yang diberikan oleh implementator kebijakan kepada masyarakat, serta pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh para pelaksana terhadap kegiatan program PDPGR kepada masyarakat serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap segala bentuk kegiatan program PDPGR sehingga pelaksanaan dari kegiatan tersebut belum optimal.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas dapat diambil saran kedepannya agar dalam proses implementasi Perda No. 3 Tahun 2016 tentang PDPGR di Kelurahan Telaga Bertong bisa berjalan lebih optimal lagi maka diharapkan kepada pihak yang bertanggung jawab menjalankan program ini untuk lebih meningkatkan kualitas serta kuantitas dari sumber daya manusia (SDM) nya sendiri. Hal ini dinilai menjadi salah satu kelemahan dari

proses berjalannya program ini. Lebih selektif dalam merekrut anggota/petugas program PDPGR ini dengan cara memberikan persyaratan seperti tingkat pendidikan yang minimal S1 dan memberikan pelatihan Khusus bagi para anggota/petugas yang baru direkrut sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dalam menjalankan Program PDPGR ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Edward, George C, III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington Dc: Texas A & M University. Congretional Quarterly Press.
- Peraturan Bupati Nomor 19 Ayat 1 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PDPGR
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong
- Peraturan Perundang – Undangan
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Widodo, Joko.2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Baju Media Publishing.
- Winarmo, Budi:2002: *Teori dan Proses Kebijakan Publik*: Yogyakarta: Media Prasindo; hal 21